

PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KAKANIUK DAN DESA BARENE KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA

Sensisana Luruk¹, Rafael Tape Tupen², Marlyani Anita Seran³

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang^{1,2,3}

Email: esysensiana@gmail.com¹, marlyani.seran@staf.undana.ac.id², rafael.tupen@staf.undana.ac.id³

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 6
Bulan : Juni
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study aims to analyze the role of the Community Empowerment Institution (LPM) in accommodating and channeling community aspirations in village development planning in Kakaniuk Village and Barene Village. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation involving informants consisting of LPM administrators, village government officials, community leaders, and local residents. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that LPM in both villages has performed its function of accommodating and channeling community aspirations effectively, although differences exist in the implementation mechanisms. Kakaniuk Village applies a participatory bottom-up approach by placing community needs as the primary basis for village development planning. Community aspirations are collected through deliberative meetings, field surveys, and direct approaches to vulnerable community groups. Meanwhile, Barene Village applies an approach that integrates community aspirations with regional and national development policies, resulting in a more structured planning process with greater opportunities for budget support. This study demonstrates that community involvement through effective aspiration mechanisms can improve the quality of village development and make it more responsive to community needs.

Keyword: *Community Empowerment Institution, community participation, community aspirations, village development, development planning.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada perencanaan pembangunan desa di Desa Kakaniuk dan Desa Barene. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pengurus LPM, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM di kedua desa telah menjalankan fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dengan cukup baik, namun terdapat perbedaan dalam mekanisme pelaksanaannya. Desa Kakaniuk menerapkan pendekatan yang bersifat partisipatif dari bawah ke atas (bottom-up), dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar utama dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dikumpulkan melalui musyawarah, survei lapangan, serta pendekatan langsung kepada kelompok masyarakat rentan. Sementara itu, Desa Barene menerapkan pendekatan yang memadukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih terstruktur dan memiliki peluang dukungan anggaran yang lebih besar. Penelitian ini menunjukkan

bahwa keterlibatan masyarakat melalui mekanisme aspirasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembangunan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, partisipasi masyarakat, aspirasi masyarakat, pembangunan desa, perencanaan pembangunan.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk merencanakan dan menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat menjadi unsur yang sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi di lingkungannya. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa semata, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum yang memperkuat posisi desa dalam menyelenggarakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan adanya lembaga yang mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa.

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk untuk membantu pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keberadaan LPM menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, sehingga kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat diakomodasi dalam program pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPM memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi tersebut bertujuan agar berbagai usulan, kebutuhan, dan harapan masyarakat dapat dihimpun secara sistematis kemudian

disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Melalui proses tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan prioritas pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi LPM sering menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, terbatasnya penyampaian informasi, serta adanya perbedaan kebutuhan antar kelompok masyarakat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat sehingga berpotensi menghambat proses pembangunan desa yang partisipatif.

Berdasarkan hasil penelitian awal pada Desa Kakaniuk dan Desa Barene ditemukan adanya perbedaan mekanisme dalam pelaksanaan fungsi LPM dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Desa Kakaniuk cenderung menerapkan pola partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai sumber utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up approach*). Sementara itu, Desa Barene menerapkan mekanisme yang mengombinasikan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional agar program pembangunan memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh dukungan anggaran dan implementasi yang berkelanjutan.

Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa setiap desa memiliki strategi yang berbeda dalam mengelola partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan desa. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi LPM dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaannya serta kontribusinya terhadap pembangunan desa yang partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi LPM dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada perencanaan pembangunan desa di Desa Kakaniuk dan Desa Barene.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada perencanaan pembangunan desa di Desa Kakaniuk dan Desa Barene.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan ketua LPM, anggota LPM, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan

masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Kakaniuk dan Desa Barene

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan melalui penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi LPM di Desa Kakaniuk dan Desa Barene telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, meskipun pelaksanaannya masih belum optimal.

1. Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kakaniuk, proses penyusunan rencana pembangunan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tahapan dimulai dari pengumpulan usulan masyarakat melalui tingkat RT/RW hingga forum musyawarah desa. LPM melakukan pendataan langsung terkait kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, perbaikan irigasi, fasilitas umum, serta kebutuhan sosial lainnya.

Keunggulan yang ditemukan di Desa Kakaniuk yaitu adanya perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti keluarga miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui kunjungan langsung dari rumah ke rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan dilakukan secara inklusif sehingga seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan.

Berbeda dengan Desa Kakaniuk, Desa Barene memiliki pendekatan yang lebih terintegrasi. Sebelum penyusunan program pembangunan dilakukan, pemerintah desa dan LPM mengundang pihak terkait dari pemerintah daerah untuk memberikan informasi mengenai program pembangunan daerah dan nasional. Hal ini bertujuan agar program

pembangunan desa dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh dukungan anggaran.

Selain itu, Desa Barene memiliki sistem manajemen yang lebih terencana dengan menyiapkan skenario alternatif apabila terjadi hambatan selama pelaksanaan program pembangunan. Misalnya ketika terjadi keterlambatan material pembangunan, desa memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia sebagai alternatif tanpa mengurangi kualitas pembangunan.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, proses penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Kakaniuk telah berjalan secara sistematis. LPM menyediakan berbagai sarana penyaluran aspirasi seperti kotak aspirasi, rapat bulanan, posko aspirasi di dusun, serta grup WhatsApp masyarakat desa.

Aspirasi yang masuk kemudian dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhan, yaitu: aspirasi darurat, aspirasi jangka pendek, dan aspirasi jangka panjang.

Setiap aspirasi dicatat dan diberikan tanggapan dalam waktu tertentu sehingga masyarakat mengetahui tindak lanjut dari usulan yang telah diberikan. Pendekatan tersebut menciptakan hubungan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 85% rencana pembangunan desa berasal dari aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun oleh LPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi LPM sebagai penampung dan penyalur aspirasi telah berjalan secara efektif.

Di Desa Barene, mekanisme penampungan aspirasi memiliki pendekatan yang berbeda. LPM lebih mengutamakan penyelesaian masalah melalui pendekatan khusus, terutama terhadap aspirasi yang bersifat sensitif. Misalnya terkait pembagian bantuan sosial atau kepentingan kelompok tertentu, LPM melakukan pertemuan tertutup untuk menghindari konflik di masyarakat.

LPM juga melakukan kunjungan ke daerah terpencil serta membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapat secara tertulis. Pendekatan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Kakaniuk dilakukan melalui pendekatan pendidikan dan penghargaan. LPM secara rutin menyelenggarakan pelatihan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan melalui sistem gotong royong.

Selain itu, masyarakat yang aktif diberikan penghargaan dalam bentuk piagam maupun bantuan alat kerja sebagai bentuk apresiasi. Strategi tersebut mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan.

Sementara itu, Desa Barene lebih menekankan pada pembangunan kepercayaan masyarakat dan keterlibatan pemuda. Kegiatan musyawarah sering dijadwalkan pada sore hari atau hari libur agar masyarakat dapat berpartisipasi lebih banyak. Transparansi penggunaan anggaran juga dilakukan secara terbuka agar masyarakat memiliki rasa percaya terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Desa Barene juga membentuk kelompok pemuda pembangunan desa yang diberikan tanggung jawab dalam pengembangan proyek pembangunan dan ekonomi digital desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tingkat partisipasi masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi LPM

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya faktor penghambat yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Keterbatasan sumber daya manusia

Hambatan utama yang ditemukan pada kedua desa adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengurus LPM. Sebagian besar pengurus dipilih berdasarkan keaktifan di masyarakat, bukan berdasarkan kemampuan teknis dan latar belakang pendidikan. Akibatnya, pengurus mengalami kesulitan dalam: Penyusunan laporan administrasi, Penyusunan proposal, Pengelolaan keuangan, Penggunaan teknologi serta Penyusunan program Pembangunan.

Selain itu, keterbatasan sarana seperti komputer, akses internet yang tidak stabil, serta minimnya tenaga kerja juga memengaruhi pelaksanaan tugas LPM.

Kurangnya koordinasi

Koordinasi antara LPM dan pemerintah desa juga belum berjalan secara optimal. Di Desa Kakaniuk hambatan terjadi karena belum adanya kesamaan persepsi dan mekanisme komunikasi yang jelas. Sedangkan di Desa Barene hambatan muncul karena pembagian tugas yang belum jelas sehingga menyebabkan tumpang tindih pekerjaan.

b. Faktor Eksternal

Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sebagian besar anggaran desa digunakan untuk kebutuhan operasional sehingga dana untuk pembangunan baru menjadi terbatas. Akibatnya banyak usulan masyarakat belum dapat direalisasikan secara maksimal.

Rendahnya partisipasi masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama pada kedua desa. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah desa dan LPM semata.

Di Desa Kakaniuk ditemukan adanya menurunnya semangat gotong royong dan tuntutan imbalan materi dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan di Desa Barene hambatan utama berasal dari budaya ketergantungan terhadap bantuan sehingga masyarakat cenderung menunggu bantuan dibandingkan terlibat secara aktif dalam pembangunan desa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada perencanaan pembangunan desa di Desa Kakaniuk dan Desa Barene, dapat disimpulkan bahwa LPM pada kedua desa telah menjalankan fungsi dan perannya dalam mendukung pembangunan desa, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Pelaksanaan fungsi LPM di Desa Kakaniuk lebih menekankan pendekatan partisipatif melalui mekanisme bottom-up, yaitu menempatkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai dasar utama dalam penyusunan program pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dihimpun melalui musyawarah desa, kunjungan langsung, serta berbagai media komunikasi yang tersedia sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sementara itu, pelaksanaan fungsi LPM di Desa Barene dilakukan dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan memperbesar peluang memperoleh dukungan anggaran serta keberlanjutan program pembangunan desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi LPM yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia pengurus LPM, kurang optimalnya koordinasi

antar pihak, serta keterbatasan sarana pendukung. Sementara faktor eksternal meliputi keterbatasan anggaran pembangunan desa dan rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kemampuan pengurus LPM dalam mengelola aspirasi masyarakat, serta dukungan pemerintah desa dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aldo Aviandri, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa, Skripsi, UPN Veteran Surabaya, (2015), Hlm. 1-2
- Bintoro Tjokroamidjojo, "Pengantar Administrasi Pembangunan" (Jakarta: LP3ES, 2011), hal. 1
- Britha, Mikkelsen. 2011. Metode Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Pandangan Bagi Praktis Lapangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Chambers, Robert. 1995. Poverty and Livelihoods : Whose Reality Counts? People: From Impoverishment to Empowerment. New York: New York University Press.
- Darwin, dkk. 2025. Pemberdayaan Masyarakat Desa: Pendekatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Bandung
- Fahrudin, Adi. (2012). Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Gitosaputro, S & Rangga K.K. 2015. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ginandjar Kartasasmita, Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, (Jakarta: CIDES, 1996), hal. 12
- HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Hlm 3
- Himmah, LN, Mahanani, C., & Kholifah, N. (2025). Peningkatan Ekonomi Kreatif Desa Pacarejo melalui Teknik Ecoprint
- I Nyoman Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (Jakarta: Citra Utama, 2011), hal. 10

- Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). Pengembangan Komunitas: Alternatif Berbasis Komunitas di EraFrenchs Forest, NSW: Pearson Education Australia.
- Mardikanto, Totok & Soebiato poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha Taliziduhu, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 132
- Putri, BAP, & Baidhowah, AR (2025). Collaborative Governance dalam Penanganan Kemiskinan melalui Program Desa TUMIS . IPDN
- Sondang Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 31
- Soeharto, E. (2010). Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran . Bandung: Refika.
- Soerjino soekanto, 2006 Pengantar Penelitian (Jakarta : Universitas Indonesia Press,) h.11
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sumaryadi, I. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dJakarta: Citra Utama.
- Sumodiningrat. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT, Bina Rena Pariwisata
- Trisantono Soemantri, Bambang. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokus Media. Bandung.
- Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 12.
- Jurnal :
- Desriadi, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.1, 2018, hal. 86
- Himmah, LN, Mahanani, C., & Kholifah, N. (2025). Peningkatan Ekonomi Kreatif Desa Pacarejo melalui Teknik Ecoprint. Jurnal Univrsitas Negeri Yogyakarta Vol 5, N0. 2
- Ison Wuwange, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyakat (LPM) dalam Pembangunan desa (Studi Kasus Desa Gurisia, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo) Skripsi Universita Negeri Gorontalo, (2019)
- Mia Aninda Kirana (2018_. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif(Studi Kasus Desa Petaling, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Univerisitas Sriwijaya

- Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik*, Vol 1 No 1 (Tahun 2013), hlm. 89
- Suyatno, S. (2025). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penguatan Pendidikan Islam di Kabupaten Magelang. Universitas Islam Sultan Agung.
- Susanti, A., & Sari, K. (2025). Pemahaman Lingkungan Berkelanjutan melalui Ecoprinting pada Masyarakat Desa Mekar Jaya. *Jurnal BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Teraik, et., all., Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, Vol. 15 No. 2, 2015, hal. 36
- Tita. G. T. (2020). B Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa, lokasi penelitian berada di Desa Kaligandu, Kecamatan Serang, *Jurnal. UIN. Sultan Maulana Hasannuddin Banten*
- Wuwange. I. (2019). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Des(Studi Kasus di Desa Gurisia, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo; Gorontalo; Universitas Negeri Gorontalo
- Undang - Undang :
- UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Mengatur Otonomi Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal